

MASYKUR WAHID

AGAMA, ETNISITAS DAN RADIKALISME: Pluralitas Masyarakat Kota Sala¹

Abstrak

Tradisi radikalisme lahir dari gejolak pemberontakan yang ditujukan kepada penguasa (politik) atau kelompok berkuasa (ekonomi) untuk cita-cita atau harapan tercapainya keadilan. Atas dasar ideologi gerakan, radikalisasi sosial "Wong Sala" setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu pertama, kelompok kiri yang digerakkan oleh masyarakat buruh atau kelompok yang menginginkan adanya keadilan ekonomi. Kedua, kelompok kanan yang dilandasi dengan semangat agama (Islam) melawan hegemoni negara. Kelompok kedua ini muncul akibat kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok Islam.

Masyarakat Kota Sala adalah prototipe masyarakat Indonesia yang plural baik etnis, agama maupun budaya. Beberapa tradisi berkembang di kota ini dengan latar belakang agama: Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu. Dua komunitas yang dominan, yaitu Islam dan Kristen. Etnisitas Kota Sala terdiri dari Jawa (Sala dan pendatang), Tionghoa (China), Minang, Sunda, dan lain-lain. Sala dikenal sebagai salah satu 'ibu kota' kebudayaan Jawa, pusat berkembangnya tradisi Jawa. Meskipun demikian, sebagai kota penting sejak periode Jawa kuno, Kota Sala menyedot banyak pedagang untuk mengembangkan bisnis dan investasi, di antaranya komunitas etnis Tionghoa yang mendominasi perdagangan di Kota Sala. Etnis ini menjadi sasaran kerusuhan Mei 1998.

Radikalisasi sosial muncul akibat ketimpangan sosial. Dambaan masyarakat lapis bawah atas munculnya 'ratu adil' menciptakan kelompok sosial yang kritis dan cenderung melawan kekuasaan. Mereka pada awalnya membentuk kekuatan melawan hegemoni kelompok feodal yang berkolaborasi dengan pemerintah kolonial, tidak didasari dengan elemen nasionalisme tetapi ketidakpuasan atas berbagai kebijakan yang menyudutkan posisi masyarakat. Karena itu, pluralitas masyarakat Kota Sala perlu dilihat sebagai bagian dari proses natural yang harus dijaga keseimbangannya. Eksistensi pengusaha Cina, Muslim dan masyarakat berbeda agama dan keyakinan baik Muslim, Kristen, abangan menunjukkan fenomena masyarakat yang terbentuk selama ratusan tahun. Kondisi ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia ke depan, misalnya bagaimana pendidikan Islam mulai memperkenalkan kehidupan yang toleran.

Kata Kunci: *Agama, Etnisitas, Radikalisme, Pluralitas, dan Sala.*

Pendahuluan

Agama dan etnisitas merupakan dua aspek penting yang mempengaruhi dinamika hubungan sosial di Indonesia. Berbagai konflik pasca Orde Baru ambruk sebabkan puluhan ribu meninggal dan ratusan ribu lainnya mengungsi ke berbagai wilayah di Indonesia yang lebih aman juga melibatkan unsur agama dan atau etnis. Keterlibatan etnis Madura dan Dayak di Kalimantan Barat, Muslim dan Kristen di Maluku dan Poso adalah di antara sejarah kelim hubungan sosial yang kental dengan semangat etnisitas dan agama. Ekspresi etnisitas dan agama diatur secara ketat pada masa Orde Baru dengan berbagai regulasi dan gerakan politik sebabkan terpendamnya berbagai rasa dendam, kekecewaan, dan diskriminasi. Golkar dan tentara memainkan peran sangat kuat upaya memprioritaskan kebijakan negara, yaitu pertumpuhan ekonomi, dan mengabaikan pertumbuhan kultural. Akibatnya, kemajuan ekonomi tidak dibarengi dengan fondasi kultural yang mapan. Kebijakan negara berorientasi pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata. Karena itu, sikap anti minoritas sangat kental. Di antaranya adalah anti Tionghoa dan anti Kristen. Beberapa peristiwa anti Tionghoa terjadi pada akhir dekade Orde Baru, yaitu pada 1996 di Situbondo dan Tasikmalaya. Gejala yang sama juga terjadi di Kota Sala, bagaimana dinamika hubungan sosial sangat rentan akibat kebijakan negara dan tumbuhnya kelompok yang memainkan semangat agama dan etnisitas.

Independensi masyarakat Sala sangat dipengaruhi oleh lemahnya wibawa kultural. Sultan Surakarta dan keluarga kerajaan tidak mendapatkan apresiasi yang kuat seperti penguasa kultural di Yogyakarta. Karena itu, perlawanan masyarakat atas penguasa kerap muncul dalam sejarah Sala. Mulai dari koalisi tokoh petani pribumi dan aktivis milisi Tionghoa melawan Paku Buwono II pada abad 17, hingga kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Sala terhadap simbol Orde Baru pada Mei 1998. Sikap anti pemerintah ini menjadi tradisi terpendam masyarakat Sala. Ketika terjadi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan semangat mereka, maka timbul kekerasan. Kerusuhan pro-Mega pasca penentuan presiden melalui voting MPR pada November 1999 adalah bagian dari tradisi ini.

Masyarakat Kota Sala adalah prototipe masyarakat Indonesia yang plural baik etnis, agama maupun budaya. Beberapa tradisi berkembang di kota ini dengan latar belakang agama: Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu. Dua komunitas yang dominan, yaitu Islam dan Kristen. Dalam umat Islam sendiri terdapat banyak ideologi yang berkembang: (1) Islam radikal, yang dipelopori oleh jaringan komunitas alumni Pesantren Al Mukmin Ngruki, dan berbagai laskar. Kelompok ini sangat tampak dipermukaan ketika terjadi konflik Maluku dan Poso (1999-2002), tempat

banyak laskar Mujahidin dan berbagai jenis laskar lain dari Sala melakukan mobilisasi pengiriman sukarelawan untuk berjihad. Juga menjadi asal berdirinya kelompok Salafi, yang mendirikan Laskar Jihad tahun 2000, dan kini kelompok ini menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. (2) Islam moderat, yang dipelopori oleh jaringan pesantren Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi Muslim terbesar di Indonesia ini memiliki basis komunitasnya sendiri di kota ini. (3) Islam abangan, yang secara KTP beridentitas Islam, tetapi dalam praktik sehari-hari melakukan tradisi dan ritual Kejawen, yang dekat dengan budaya Hindu-Budha. Sementara itu, Kristen Katolik sangat dominan di kota ini, khususnya karena pengaruh Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Etnisitas Kota Sala terdiri dari Jawa (Sala dan pendatang), Tionghoa (China), Minang, Sunda, dan lain-lain. Sala dikenal sebagai salah satu 'ibukota' kebudayaan Jawa, pusat berkembangnya tradisi Jawa. Meski demikian, sebagai kota penting sejak periode Jawa kuno, Kota Sala menyedot banyak pedagang untuk mengembangkan bisnis dan investasi. Di antaranya adalah komunitas etnis Tionghoa yang mendominasi perdagangan di Kota Sala. Etnis ini menjadi sasaran kerusuhan Mei 1998. Beragamnya agama dan etnis ini memaksa partai politik untuk bersikap terbuka, inklusif, dan tidak mengundang simbol rasialis. Ketika pemilihan Walikota Sala tahun 2005, calon dari partai nasionalis, PDI-P mendapatkan suara terbanyak, sesuatu yang mengejutkan bagi banyak aktivis Islam. Berdasarkan latar belakang ini pentingnya melihat lebih jernih bagaimana peta keberagaman masyarakat Sala. Apakah studi atas pluralitas masyarakat Sala bisa menganalisis hal yang sama untuk masyarakat Indonesia?

Landasan analisis terhadap fenomena hubungan sosial dan tradisi kekerasan di Kota Sala. C.W. Watson menyatakan bahwa di kalangan cendekiawan multikulturalisme dianggap sebagai kebijakan untuk mencapai tatanan masyarakat di mana warga yang berasal dari berlain-lain agama, suku, adat, atau kebudayaan dapat hidup bersama-sama dan membaaur dalam pergaulan sehari-hari dengan damai dan sejahtera tanpa mengorbankan ciri-ciri khasnya masing-masing. Malahan, diberi peluang sepenuh-penuhnya untuk mempertahankan adat dan tradisinya. Perlu ditegaskan bahwa kebijakan ini bertolak belakang dari kebijakan assimilationism (usaha untuk mempersamakan semua kelompok dalam satu masyarakat) atau ideologi "melting-pot" di Amerika Serikat zaman dulu di mana yang diharapkan ialah semua orang dari manapun mereka berasal - dari negeri gunung atau kepulauan dekat laut - akan ketemu di kwali juga dan sesudah dikocok di sana akhirnya akan keluar sama semua. Multiculturalism beranggapan bahwa prinsip "melting-pot" ialah satu penghinaan karena seakan-akan memaksa orang menanggalkan

warisan dari leluhurnya yang diterima secara terhormat turun-temurun, dan menjadikan mereka manusia baru, seragam dengan warga yang lain.

Mengacu pemikiran Furnivall (1948), Parsudi Suparlan membedakan antara masyarakat plural dan masyarakat multikultural. Pada dasarnya masyarakat plural mengacu pada suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai unsur masyarakat yang memiliki ciri-ciri budaya yang berbeda satu sama lain. Masing-masing unsur relatif hidup dalam dunianya sendiri-sendiri. Hubungan antarunsur yang membentuk masyarakat plural tersebut relatif lebih rendah dan terbatas. Hubungan antarunsur yang berbeda itu juga ditandai oleh corak hubungan yang dominatif, dan karenanya juga bersifat diskriminatif. Meski wujud konkretnya masih terlihat samar-samar, tatanan masyarakat multikultural yang hendak dituju cenderung mengacu pada suatu tatanan masyarakat yang unsur-unsurnya memiliki ciri yang juga beragam.

Perbedaan yang jelas dibandingkan dengan masyarakat plural ialah dalam masyarakat multikultural terdapat interaksi yang aktif di antara unsur-unsurnya melalui proses belajar. Lebih dari itu, kedudukan berbagai unsur yang ada di dalam masyarakat itu berada dalam posisi yang setara, demi terciptanya keadilan di antara berbagai unsur yang saling berbeda. Lebih jauh Suparlan menggarisbawahi bahwa konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan multikulturalisme mau tidak mau mengulas pula berbagai permasalahan yang mendukung konsep ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika, dan moral. Untuk memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan, dan mendukung keberadaan, serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Konsep-konsep tersebut, antara lain demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas (Fay, 1996; Rex, 1985; Suparlan, 2002).

Di Indonesia untuk membedakan bentuk kebijakan kehidupan masyarakat majemuk di zaman Orde Baru dan masyarakat ideal multikultural, C.W. Watson membedakan *soft multiculturalism* dengan *critical multiculturalism*. *Soft multiculturalism*, yaitu jenisnya yang disponsori oleh Orde Baru, dan sering ditemukan juga di negara-negara lain yang terdiri dari suku-suku yang berbeda-beda, bertolak dari pendapat bahwa

budaya, kultur, terdiri dari beberapa ciri khas yang dapat dilihat dan dihitung. Ciri-ciri, seperti kegiatan kesenian, tarian, lagu, atau bentuk rumah, pakaian, makanan, upacara adat, kerajinan tangan. Pendeknya hal-hal yang dapat dipertontonkan sebagaimana selalu diusahakan di Taman Mini dulu dan dalam acara mingguan di TVRI. Di sekolah-sekolah pula murid-murid diperkenalkan pada perbedaan adat di Indonesia lewat pelajaran PMP dan acara-acara, seperti pada hari Kartini. Harapan dan kepercayaan orang pemerintahan ialah dengan mengenal dan menghafal sifat-sifat nyata dari budaya kelompok akan lahir satu toleransi terhadap perbedaan. Pendapat ini juga kita dapat saksikan di sekolah-sekolah Inggris di mana murid-murid diperkenalkan pada cara berpakaian orang India (*sari*), musik orang pendatang dari daerah Caribbean (*steel-bands*), dan makanan orang Pakistan (*samosa*). Sampai akhirnya, perkataan "*sari, steel-bands and samosa*" menjadi ejekan bagi orang yang melihat betapa dangkal pandangan pemerintah yang beranggapan bahwa pengenalan atas hal-hal kecil ini yang tidak berarti akan membawa murid dan rakyat pada suatu pengetahuan mendalam mengenai kebudayaan orang lain. *Soft multiculturalism* hanya membuka mata kita pada variasi dan banyaknya pilihan dalam kehidupan dan bisa mengubah kebiasaan menu makanan, misalnya orang Inggris doyan makan *kari*, tetapi tidak mungkin meningkatkan kesadaran atas kepentingan nilai-nilai dan kepercayaan dalam kehidupan dan harga diri satu komunitas. Untuk mengarah ke yang terakhir ini, kita membutuhkan "*critical multiculturalism*".

Kondisi Masyarakat Kota Sala

Kota Sala yang secara formal dikenal Kota Surakarta merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Dengan Luas sekitar 44 Km², Kota Sala terletak di antara 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang Selatan. Kota Sala dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar, yaitu sungai Bengawan Sala, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Sala pada zaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangannya. Kota Sala sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Kota tempat Kerajaan Mataram ini memiliki lima kecamatan di bawah administrasinya, yaitu Kecamatan Banjarsari, Laweyan, Jebres, Pasar Kliwon, dan Serengan.

Jumlah penduduk Kota Sala pada tahun 2005 adalah 534.540 jiwa terdiri dari 250.868 laki-laki dan 283.672 wanita. Sex ratio-nya 96,06 yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 laki-laki. Angka ketergantungan penduduk sebesar 66%. Jumlah penduduk tahun 2005 jika dibanding dengan jumlah penduduk tahun 2000 hasil sensus yang sebesar 490.214 jiwa, berarti dalam 5 tahun mengalami kenaikan sebanyak 44.326 jiwa. Ini adalah jumlah penduduk pada malam hari. Sedangkan, siang hari bisa lebih dari dua kali lipat. Meningkatnya jumlah penduduk ini disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Antara tahun 1995 dan 2000 terjadi penurunan penduduk, dari 516.594 turun menjadi 490.214. Berkurangnya penduduk sejumlah 26.380 karena kerusuhan pada 1998, yang mengancam keamanan masyarakat, khususnya keturunan Tionghoa.² Peristiwa yang sama terjadi di DKI Jakarta, perpindahan komunitas Cina ke luar negeri berdampak pula pada pergeseran investasi. Singapura mendapat keuntungan atas kerusuhan ini, karena modal besar mengalir dari Jakarta ke Singapura.

Daerah yang terletak di Jawa Tengah ini memiliki keanekaragaman etnis, agama dan budaya. Hal ini bisa dilihat dari populasi penduduknya yang terdiri dari berbagai ras, suku, etnis, budaya dan agama. Selain penduduk pribumi (Jawa asli), terdapat juga penduduk non pribumi, seperti Cina dan Arab. Penduduk Cina sebelum tahun 2002 tercatat sebanyak 2.515 orang, sedangkan yang lainnya sebanyak 54 orang. Jenis mata pencaharian warga Sala adalah petani, buruh tani, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengusaha, sopir, PNS/TNI, pensiunan dan lain-lain. Akan tapi, sebagian besar warga Sala menjadi buruh industri karena memang di daerah tersebut terdapat beberapa industri besar dan industri keluarga, seperti perusahaan batik "Keris", "Danar Hadi" dan lain sebagainya.

Dinamika masyarakat Kota Sala pada masa Orde Baru dan Reformasi sangat dipengaruhi sejarah Kota Sala yang mengalami perubahan politik dan budaya. Nama Kota Sala berasal dari nama sebuah desa Sala, tempat baru Kraton Kartasura yang pindah pada tahun 1746 akibat serangan kelompok pemberontak yang dibantu orang-orang Cina sejak 1743.³ Paku Buwana II memilih desa Sala karena lokasinya yang strategis, di antara Sungai Pepe dan Sungai Bengawan Sala. Sungai Bengawan Sala adalah sungai terbesar di Jawa yang memiliki arti penting menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Paku Buwana II lalu mengganti nama desa Sala menjadi Surakarta Hadiningrat. Setelah kepindahan kraton dari Kartasura ke Surakarta, Paku Buwana II membuka sejarah baru dengan masuknya peran kuat pemerintah kolonial Belanda ke wilayah Surakarta.⁴ Paku Buwana II menyerahkan kekuasaan Mataram di seluruh pesisir Jawa kepada VOC. Patih Kerajaan memiliki dua fungsi

untuk kepentingan Kraton, juga bekerja untuk pemerintah Kolonial. Pada 1755 dilakukan perjanjian Gianti, yang membentuk kraton tandingan di Yogyakarta, yaitu Kesultanan di bawah kekuasaan Hamengku Buwana I dengan wilayah separuh nagaragung dan wilayah mancanegara Mataram. Dua tahun kemudian, 1757 dilakukan perjanjian Salatiga yang membentuk Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta, dengan mengangkat Mas Said dengan gelar Pangeran Adipati Mangkunegaran. Mas Said menerima 4000 cacah atau keluarga dari wilayah Sunan, dan bertempat di Surakarta, dengan kewajiban memberi penghormatan kepada Sunan setiap minggu.

Melemahnya wibawa Kraton Surakarta dimulai sejak terpecahnya kekuasaan politik dan kultural kraton pada 1873, ketika kraton setuju untuk mengadopsi model Eropa, yaitu pemisahan wilayah tradisional kraton, dan pemerintahan (Karesidenan). Karesidenan Surakarta dibagi menjadi empat *afdeelingen* (bagian) yang masing-masing di bawah kekuasaan seorang asisten residen, yang bertanggungjawab kepada Gubernur Jenderal. Wibawa kultural kraton terkikis akibat kesepakatan politik yang harus dilakukan oleh raja ketika naik tahta. Kraton tidak memiliki kekuasaan politik, dan secara kultural sangat lemah akibat tidak ada keberdayaan kraton untuk melindungi warga. Warga Surakarta sangat tertindas di bawah kekuasaan karesidenan kolonial. Dalam jangka panjang, fenomena ini yang membedakan antara kuatnya peran kultural Sultan Yogyakarta dan lemahnya kewibawaan Kasunanan Surakarta.

Radikalisme di Sala telah dimulai sejak awal masa pergerakan (1908-1945), ketika berdiri beberapa partai politik. Munculnya berbagai pergerakan tidak memiliki motif utama antara pribumi melawan penguasa kraton dan kolonial Belanda, tetapi berasal dari pertentangan antar kelompok dengan motif ekonomi dan politik.⁵ Kota Sala sebagai salah satu pusat perdagangan di Jawa Tengah menjadi daya tarik pendatang. Selama empat tahun, dari 2001 ke 2004, jumlah pendatang naik hampir tiga ratus persen, dari 2.941 ke 8.680. Jumlah buruh mendominasi pekerjaan di Kota Sala, yang banyak diisi oleh warga dari luar Kota Sala. Penduduk menurut mata pencaharian pada 2005, yaitu buruh industri 70.254, buruh bangunan 64.406, pedagang 31.975, pensiunan 30.791, PNS 27.505, pengusaha 8.042, buruh tani 569, dan petani 486.⁶

Pluralitas Masyarakat Kota Sala

Kota Sala telah terbentuk menjadi kota yang berpenduduk heterogen secara etnis dan agama sejak beberapa abad lalu. Sebagai ibukota Kerajaan Mataram, wilayah Sala dan sekitarnya terbentuk menjadi kota metropolitan, pusat dagang dan persaingan antar elit.

Secara umum masyarakat Sala berorientasi nasionalis. Terbukti dengan prosentase arah pemilih bukan terhadap partai yang dilandasi agama. PAN dan PKS, masing-masing didukung kelompok Muslim dengan suara 12,5 % dan 10 %, partai dukungan Kristen, PDS hanya dapat 10 %. Sementara itu, partai nasionalis, PDI-P dapat 37,5 %. Hal ini dapat dilihat di dalam jumlah anggota DPRD menurut fraksinya.

Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi

No	Fraksi	Jumlah	Prosentase
1	PDI-P	15	37.5 %
2	PAN	7	17.5 %
3	Golkar	5	12.5 %
4	PDK	5	12.5 %
5	PKS	4	10%
6	PDS	4	10%
	Total	40	100 %

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2006: 18

Hasil pemilu 2005 menunjukkan deskripsi dari ideologi dan politik masyarakat Sala, yang nasionalis. Sebagian besar tidak mempertimbangkan agama sebagai orientasi utama pilihan politik. Hasil pemilu ini menarik untuk dibandingkan dengan Pemilu 1955, ketika Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasionalis Indonesia bersaing ketat. Partai berbasis Islam, misalnya Masyumi dan kemudian Nahdlatul Ulama tidak mendapat tempat signifikan dibandingkan wilayah lain di Jawa. Meskipun, secara nominal Islam adalah agama pilihan mayoritas masyarakat Sala. Pada sensus 2005, 72,29 %, Islam jauh lebih banyak dibandingkan dengan Protestan, 13, 47 %, Katolik, 13,13 %, Buddha, 0,76 % dan Hindu, 0,37 %.

Penduduk Menurut Agama

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Budha	Hindu
1	Laweyan	86.859	10.837	10.506	415	538
2	Serengan	47.570	7.473	7.247	96	72
3	Pasar Kliwon	67.042	9.551	9.100	847	168
4	Jebres	90.987	21.830	22.016	1.766	862
5	Banjarsari	110.954	25.480	24.382	1.087	353
		403.412	75.171	73.251	4.211	1.993
	Prosentase	72,29 %	13,47 %	13,13 %	0,76 %	0,37 %
	Total	558.038				

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2006: 36

Secara politis Muslim Sala adalah nasionalis, tetapi mereka juga mendukung peningkatan peribadatan. Jumlah masjid 440 dan mushalla 232, simbol pusat peribadatan Islam menunjukkan kecenderungan untuk pemisahan antara ibadah dan politik. Ketika sholat Jum'at, seluruh masjid penuh masyarakat Muslim beribadah. Sebaliknya, ketika pemilu banyak di antara mereka enggan memilih figur atau partai yang berbasis agama (Islam).

Tempat ibadah

No	Kecamatan	Masjid	Gereja	Vihara	Pura	Mushola
1	Laweyan	106	21	-	41	46
2	Serengan	43	22	1		20
3	Pasar Kliwon	70	11	-		60
4	Jebres	88	52	2		60
5	Banjarsari	133	43	2		46
	Total	440	149	5		232

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2006: 89

Radikalisasi Masyarakat Sala

Radikalisasi masyarakat Sala dalam rentang lebih dari tiga abad sejarah meliputi beberapa konteks, yang memiliki latarbelakang berbeda sehingga interpretasi atas kekerasan yang ditimbulkan beragam. Umumnya radikalisasi memiliki keterkaitan dekat dengan ekonomi dan politik, yang bisa terjadi di belahan wilayah Nusantara lainnya. Berbagai 'pemberontakan' yang dilakukan oleh beberapa gerakan pada masa kolonial Belanda yang kerap terjadi akibat kebijakan kolonial yang memojokkan ekonomi rakyat. Setidaknya terdapat tiga kecenderungan radikalisasi. *Pertama*, kekerasan yang muncul akibat ekspresi ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat atas kebijakan penguasa, baik politik maupun ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat bawah. *Kedua*, terjadi kesenjangan komunikasi antara lapisan elit dan masyarakat umum, sehingga keputusan pemerintah pusat dianggap bertentangan dengan logika masyarakat lokal. Ketiga, ideologi yang berkembang baik berbasis agama maupun politik membentuk komunitas radikal. Kelompok ketiga ini adalah bagian dari gerakan laten yang naik turun sesuai dengan perkembangan politik lokal dan nasional.

Selain gerakan radikal yang muncul pada abad 18 sebagai ekspresi atas tekanan ekonomi, tiga abad kemudian berkembang beberapa gerakan radikal berbasis agama, yang berbeda perspektif dengan peristiwa awal pembentukan Kota Sala. Masyarakat Muslim Sala telah menjadi barometer dan inspirator berbagai gerakan radikal di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru. Fenomena ini bisa dilihat sebagai kelanjutan dari beberapa gerakan pada tahun 1960an, ketika Partai Komunis Indonesia mendominasi politik lokal, dan masyarakat Islam terpojok.

Partai Masyumi menjadi harapan Muslim lokal untuk berhadapan dengan radikal kiri, aktivis politik komunis. Bubarnya Masyumi di penghujung pemerintah Sukarno, dan semakin tersingkirnya gerakan politik Islam pada dekade pertama kepemimpinan Suharto, memunculkan sikap apatis yang mendalam di kalangan Muslim. Aktivitas Darul Islam (Negara Islam Indonesia) tumbuh dengan baik di Jawa Tengah, termasuk di Sala pada masa pemerintahan Soekarno, dan terus bergerak di bawah tanah pada masa Soeharto. Oposisi gerakan Islam berkembang dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan, di antaranya Yayasan Al Mukmin Ngruki pada tahun 1972. Pendidikannya yang terkenal menelorkan banyak aktivis Islam adalah Madrasah Muallimin, yang menggabungkan tradisi belajar di Pesantren Darussalam Gontor, dengan aktif Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, dan sistem pengajaran salafi, dengan menekankan beberapa buku utama yang ditulis oleh para Mujahidin dari Timur Tengah, seperti Jundullah oleh Said Hawwa, *Al Wala' wal Bara'*, dan beberapa buku Ustadz Abdullah Azzam.

Pasca runtuhnya Suharto, ketika kebebasan ekspresi mendapatkan tempat utama, alumni Al Mukmin Ngruki dan aktivis Islam lain mendirikan beberapa organisasi Islam baru, diantaranya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Mujahidin Kompak, Laskar Jundullah, Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM), Jamaah Islamiah⁷ dan lainnya. Beberapa buku yang ditulis para aktivis Islam dan mujahidin di Indonesia dan Timur Tengah juga diterbitkan oleh beberapa penerbit baru, yaitu Al Jazeera dan Al Qawam, yang juga menerbitkan majalah. Buku Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, yang dicetak puluhan ribu eksemplar, dan kini menginjak edisi ketiga sejak 2005 oleh penerbit Al Jazeera, juga merupakan fenomena baru gerakan Islam. Imam Samudra adalah salah satu dari tiga terpidana mati Bom Bali 2002, yang pada awal tahun 2008 mendapatkan kesempatan untuk memohon grasi kepada Presiden Yudhoyono sebagai tahap akhir, sebelum pidana mati dilangsungkan. Dua terpidana lain adalah Ali Ghufuran alias Mukhlas dan Amrozi. Ali Ghufuran adalah alumni Madrasah Muallimin Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki.

Munculnya gerakan radikal berbasis agama ini menurut Scott Appleby sebagai ekspresi atas “Kemarahan Sakral melawan diskriminasi rasial, etnis dan agama; ketidakadilan kebijakan ekonomi, korupsi dan hipokritas dalam pemerintah; kebijakan negara atau swasta, kekerasan sistematis dan keamanan.”⁸ Imam Samudra menyatakan bahwa Bom Bali, 12 Oktober 2002 adalah bagian dari ekspresi balasan bagi Barat, khususnya Amerika Serikat dan beberapa sekutunya, yang dianggap menghancurkan eksistensi Islam di Afganistan, Palestina, dan wilayah lain.⁹ Akan tetapi, berdirinya beberapa laskar dan milisi Islam untuk

dikirim ke daerah konflik di Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah, memiliki alasan berbeda, yaitu membantu masyarakat Muslim yang dianggap terdesak oleh tekanan pasukan Kristen, dan tidak melihat pasukan keamanan negara tidak melindungi masyarakat Islam. Milisi yang terbentuk pasca perang Afganistan dan konflik di Maluku dan Poso melahirkan gerakan baru Islam di Sala, gabungan antara ideologi salafi dengan kemampuan semi-militer.

Keberagaman Kota Sala

Sebagaimana banyak kota lain di Indonesia, Kota Sala sangat diwarnai oleh pendatang. Romo Mardi menyebutkan bahwa:

”Masyarakat asli Sala sangat toleran dan reseptif atas segala agama, ideologi dan organisasi politik yang masuk. Mereka secara terbuka menerima setiap pengaruh positif. Karena itu, dimanika politik nasional banyak mendapat semangat awal dari kota ini. Misalnya, berdirinya Sarikat Islam pada 1912 menandai kebangkitan pergerakan dengan identitas agama dan etnis. Juga penggulingan Suharto pada 1998 mendapat sambutan hangat dengan gerakan anti Orde Baru.”¹⁰

Keberagaman Kota Sala tercermin dari meratanya organisasi dari faksi Kiri ke faksi Kanan, kelompok-kelompok Radikal, dan tumbuhnya organisasi masyarakat minoritas. Masyarakat beragam etnis tersebar di berbagai wilayah di Kota Sala. Mereka tertata secara geo-politik sejak masa kolonial.

Tabel Etnis-Etnis di Kota Sala¹¹

Etnis	Lokasi
1. Jawa	Tersebar di seluruh kota, sebagai etnis mayoritas
2. Cina	Daerah Pasar Gede, Balong, Kecamatan Jebres (Kelurahan Sudiroprajan, Jagalan, Tegalharjo), Kecamatan Banjarsari (Kelurahan Gilingan, Ketelan, Timuran, Stabelan), Solo Baru
3 Arab	Kecamatan Pasar Kliwon (Kelurahan Pasar Kliwon, Semanggi, Kedung Lumbu).
4.India dan Eropa	Loji Wetan

Dari tabel ini bisa dilihat bagaimana keragaman masyarakat Kota Solo telah terbentuk. Interaksi sosial tidak hanya lintas etnis pribumi, tetapi juga banyak masyarakat minoritas lain.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2005 bahwa penduduk Kota Sala beragama Islam, yaitu 403.412 (72 %), mayoritas dari total penduduk 558.038 dan penduduk minoritas terbesar yaitu Kristen sebesar 148.422 (27 %), terdiri dari 73.251 (13 %) Katolik dan 75.171 (14%) Protestan.¹² Hal ini menunjukkan keberagaman yang kuat,

seimbang secara kultural dan agama. Apalagi, Muslim di Kota Sala lebih berorientasi nasionalis, dibandingkan agama. Terbukti dengan kuatnya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang mendominasi di DPRD dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pemilu 2004, jumlah kursi PDIP 15, Golkar 5, PDK 5, PAN 7, PKS 4 dan PDS 4.¹³ Walikota Sala pasca Orde Baru selalu didominasi oleh faksi nasionalis, antara lain saat ini Joko Widodo, representasi dari PDIP. Kuatnya Muslim nominal di Kota Sala mendapat tantangan dengan keberadaan kelompok radikal yang mewarnai gerakan atas nama Islam. Beberapa kelompok secara rutin melakukan *sweeping* terhadap lokasi perjudian, khususnya pada saat bulan Ramadhan. Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dan Forum Komunikasi Aktifis Masjid (FKAM) adalah di antara beberapa kelompok radikal yang gencar melakukan *sweeping* terhadap lokasi perjudian, diskotik dan tempat-tempat yang dianggap melanggar prinsip syari'at Islam.¹⁴ Akan tetapi, berbagai benturan antar kelompok lebih banyak bermotif ekonomi dibandingkan agama atau etnis. Dalam sejarah hubungan antar etnis dan agama di Kota Sala, sangat kental diwarnai dengan bentrokan antar kelompok. Misalnya Kongsi Cina melawan Pedagang Muslim, atau pribumi dan Arab. Menurut M. Dian Nafi', salah satu ulama Sala yang aktif mempromosikan gerakan perdamaian, menyatakan bahwa:

"Para tokoh berbagai agama telah lama menjalin komunikasi dan kerjasama untuk membangun perdamaian dan menjaga hubungan harmonis antar masyarakat berbeda agama dan etnis."¹⁵

Mereka bergerak aktif sejak masa Orde Baru dan secara intensif melakukan revitalisasi damai pasca kerusuhan Mei 1998, yang menimbulkan kerusakan terutama pada properti masyarakat Tionghoa di Sala.

M. Dian Nafi', pengasuh Pesantren Al-Muayyad Windan Makamhaji Kartasura, Sukoharjo, mempelopori komunikasi aktif yang melibatkan kelompok muda dan santri. Model pendidikan di Pesantren Al-Muayyad Windan berbeda dengan pesantren pada umumnya. Ustadz Nafi' menerima beberapa santri non Muslim untuk berkomunikasi aktif dengan santri, dan memfasilitasi berbagai pertemuan antar agama di pesantren. Ustadz Nafi' telah melakukan *Peaceful Co-Existence*, gerakan perdamaian yang secara aktif dan seimbang dilakukan oleh seluruh faksi. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kegiatan sosial membentuk karakter kuat Ustadz Nafi' untuk membangun model pendidikan pesantren yang mendukung pluralitas dan perdamaian. Lahir di Sragen pada 4 April 1964, Ustadz Nafi' belajar dengan Ayahnya di pesantren Al-Muayyad, kemudian melanjutkan pendidikan S1 jurusan Komunikasi di

Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan program master Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Jakarta. Sejak 1999 aktif dalam berbagai forum rekonsiliasi di Ambon, Sulawesi, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Madura dan Papua. Di antara hasil refleksi pengalaman Ustadz Nafi' dibukukan dalam modul pendidikan pesantren untuk perdamaian, *Praksis Pembelajaran Pesantren*.¹⁶ Romo Mardi merasakan pentingnya komunikasi aktif yang difasilitasi oleh Ustadz Nafi' yang diikuti oleh berbagai unsur Muslim, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, dan pengusaha Tionghoa. Sayangnya tidak semua kelompok Muslim setuju dalam pertemuan komunikatif ini. Semua kelompok masyarakat selalu diundang, dan beberapa kelompok radikal Muslim pernah ikut tetapi memiliki pandangan berbeda. Mereka selanjutnya tidak ikut dalam gerakan perdamaian.¹⁷

Kekerasan dan Konflik

Kota Sala sering disebut sebagai kota sumbu pendek, kota yang mudah tersulut kerusuhan antar etnis atau kelompok. Terdapat berbagai benturan sosial yang melibatkan kelompok-kelompok sosial, antara lain bentrokan antara kelompok pribumi (Jawa) dan Cina, gerakan anti pemerintah (swapraja), dan kerusuhan antar partai politik. Sejak 1743 hingga 1999, kerusuhan terbanyak melibatkan Cina sebagai pelaku dan atau korban. Antara lain Geger Pecinan pada 1743, yang merupakan akar ideologi konflik pribumi dan non pribumi. Koalisi Cina dan pemberontak berhasil memaksa Paku Buwono II untuk memindahkan Kraton dari Kartasura ke Desa Sala. Pada 1911 bentrokan kelompok Cina dan pribumi terjadi. *Kong Sing* Cina, kelompok pedagang Cina berhadapan dengan pedagang batik pribumi Muslim, yang membentuk paguyuban keamanan *Reksa Roemekso*, saling menjaga. Paguyuban ini menjadi cikal bakal bedirinya Sarikat Islam pada 1912, yang memfasilitasi dan melindungi pedagang Muslim pribumi, melawan pedagang Cina, yang mendapat konsesi lebih baik dari pemerintah kolonial Belanda.¹⁸

Tiga peristiwa selanjutnya sejak 1972 hingga 1998, kerusuhan anti Cina juga terjadi, dengan pertokoan milik pengusaha Cina sebagai sasaran amuk massa. Pada 1972 kerusuhan bermula dari ketidaksepahaman antara seorang encik Arab dan penarik becak yang berakhir dengan meninggalnya penarik becak. Kabar meninggalnya tukang becak menyebar ke seluruh Kota Sala, dan menyulut kemarahan massa lapis bawah. Mereka membakar pertokoan pasar Pon dan Coyudan dari sore hingga malam hari. Anehnya, kebanyakan pertokoan di pusat kota yang terbakar dan rusak milik pengusaha Cina. Peristiwa selanjutnya pada 19 November 1980 lebih tegas, diawali dengan insiden kecil antara seorang pejalan kaki, yang kebetulan Cina, dan seorang warga (pribumi) Sala yang

bersepeda di sepanjang jalan Urip Sumoharjo. Insiden kecil ini berubah menjadi perkelahian yang melibatkan masyarakat luas dengan simbol kuat pri versus non pri. Akibatnya, pembakaran dan pengrusakan atas pertokoan milik Cina terjadi diseluruh ruas jalan. Peristiwa terakhir pada 14-15 Mei 1998, menjelang tergulingnya Suharto. Menurut Thung Ju Lan, kerusuhan yang terjadi di Sala pada Mei 1998 selain terkait dengan persoalan politik yang melanda di pemerintahan pusat akibat ketidakpuasan terhadap rezim Orde Baru juga disebabkan oleh kesenjangan ekonomi yang terjadi antara etnis Cina dan penduduk asli Sala. Selama ini perekonomian Sala dikuasai oleh etnis Cina. Hal ini bisa dilihat dari kepemilikan etnis ini atas perusahaan-perusahaan besar, seperti Batik Keris, Sun Motor dan Luwes Group. Selain itu, ada bidang-bidang usaha tertentu yang dikuasai oleh warga Cina secara turun-temurun seperti gudang beras, gula dan minyak di dekat pasar Legi.¹⁹

Yang menarik adalah analisa yang mengatakan bahwa kerusuhan itu terkait dengan Sala sebagai tempat peredaran uang terbesar di Jawa Tengah, dan dengan struktur masyarakat Sala yang pada tingkat *grass-root*-nya ditempati oleh kelas bawah yang jumlahnya besar, dan kebanyakan dari mereka bergerak dalam sektor informal seperti pedagang kaki lima dan penarik becak.²⁰

Melihat argumen Thung Ju Lan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa penyebab konflik kerusuhan di Sala pada Mei 1998 adalah adanya rasa kecemburuan sosial dan ekonomi oleh warga miskin yang kebanyakan adalah orang-orang pribumi terhadap golongan kaya yang kebetulan didominasi oleh etnis Cina. Dalam perspektif yang lebih sempit dianggap sebagai konflik antar etnis. Akan tetapi dalam tulisan yang berbeda, Thung menulis bahwa konflik yang melanda Sala pada Mei 1998 itu merupakan peristiwa politis yang *disengaja*, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kerusuhan rasial ataupun gerakan anti Cina. hal ini dibuktikan dengan adanya pengendalian kerusuhan oleh masyarakat lapisan bawah dengan membuat brikade-brikade yang dilakukan masyarakat di mulut gang tempat tinggal mereka. Hal ini menunjukkan adanya indikasi ketidaksenangan terhadap kerusuhan. Dan, gerakan ini termasuk melindungi kelompok etnis Cina yang berdomisili di kampungnya.

Dalam pandangan yang bersangkutan, kerusuhan Mei 1998 merupakan akumulasi dari perasaan ketidakpuasan terhadap kondisi pemerintahan yang tidak adil dalam bidang ekonomi dan hukum, di samping tidak adanya saluran pendapat. Gerakan anti Cina, dalam pandangannya, hanyalah merupakan hasil pemanfaatan dari kelompok tertentu karena resiko dari gerakan tersebut adalah yang terkecil. Pendapat ini tampaknya mengacu pada pandangan beberapa pengamat

dan peneliti *masalah Cina* yang mengatakan bahwa ada kecenderungan, khususnya dari pemerintah untuk mengkambinghitamkan kelompok etnis Cina. dan ini dimungkinkan karena kedudukan kelompok tersebut secara politis amat lemah sehingga mereka tidak mengadakan perlawanan.²¹

Kerusuhan di Sala, 14-15 Mei 1998, dipicu oleh peristiwa nasional yaitu tuntutan mahasiswa atas krisis moneter berkepanjangan dengan jatuhnya nilai rupiah dan tuntutan reformasi Mei 1998. Peristiwa ini menciptakan sejarah baru Indonesia, berakhirnya Orde Baru. Namun tidak seperti biasanya, ketatnya keamanan pada sepanjang kekuasaan Soeharto, James T. Siegel heran atas begitu terbukanya akses bagi mahasiswa dan publik untuk menciptakan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan. Mahasiswa begitu lancar menduduki gedung MPR dan menguasai jalan-jalan di hampir seluruh Jakarta, disusul dengan semangat yang sama di beberapa kota besar di Indonesia.²² Pertanyaan Siegel mengarah kepada di mana peran TNI dalam mengendalikan keamanan? Adakah pembiaran TNI atas protes mahasiswa yang dijadikan katalisator jatuhnya Soeharto?

Bermula dari tertembaknya empat mahasiswa Trisakti dalam demonstrasi 12 Mei 1998 menuntut reformasi, mundurnya Soeharto dan perbaikan ekonomi. Esoknya, terjadi kerusuhan besar dengan pembakaran pertokoan milik Tionghoa, sebagai ekspresi kemarahan atas krisis. Bentuk kekecewaan ekonomi yang *by design* telah dikondisikan oleh Orde Baru bahwa imej ekonomi dikuasai oleh sekelompok konglomerat Tionghoa. Kerusuhan ini berlangsung hingga 14 Mei dengan menduduki gedung MPR. Di tempat lain kerusuhan dengan ekspresi yang sama juga timbul. Kamis, 14 Mei 1998 pukul 10.00 di Sala mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta demonstrasi menuntut reformasi dipercepat, rentetan dari tertembaknya mahasiswa Trisakti. Polisi menghadang, terjadilah bentrokan. Pelemparan baru tak terelakkan. Mulai pukul 13.00, mulai muncul pembakaran ban mobil di jalan arteri Ahmad Yani. Kemudian terkumpul pelajar, mahasiswa, buruh, karyawan dan masyarakat satu jam berikutnya di jalan Sala-Pabelan. Massa bergerak ke arah jalan Slamet Riyadi dengan melakukan pengrusakan dan pembakaran toko-toko, perkantoran, rumah, bank dan restoran. Di antara sasaran ekspresi kemarahan massa, yaitu rumah Harmoko di jalan Sala Baru. Harmoko adalah juru bicara Soeharto selama beberapa periode menjelang jatuhnya. Sehari berikutnya, 15 Mei dini hari Matahari Plaza dan Beteng dibakar dan dijarah massa. Sasaran utama pembakaran adalah show room 'mobil Timor', show room Yamaha 'Cahaya Timur', perbankan dan Matahari Plaza, tempat yang diasosiasikan dekat dengan Orde Baru. Total kerugian material kurang lebih 600 milyar rupiah.²³

Anehnya, baru malam hari dilakukan penangkapan 115 orang yang dianggap provokator oleh Polisi. Tetapi kemudian dilepas sebagian, dan hingga kini tidak ada proses peradilan atas kerusuhan ini. Masyarakat Sala kemudian mengadakan jam malam mulai hari Jum'at, 15 Mei mulai pukul 22.00. Dalam penyelesaian kerusuhan ini, dibentuklah 'Paguyuban Wong Sala', dipimpin Mudrik Sangidu.

Selain kerusuhan yang melibatkan warga Cina sebagai korban atau pelaku, kekerasan terbanyak kedua di Kota Sala memiliki akar sejarah gerakan anti-pemerintah atau swapraja. Kerusuhan pertama pada 1871 yang dikenal sebagai "Pemberontakan Petani", berawal dari penolakan kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang mengubah sistem *apanage* tanah-tanah pertanian pedesaan yang berkaitan erat dengan pemegang hak lungguh (raja dan bangsawan) dengan petani penggarap ladang, diganti dengan sistem pajak atau sewa tanah pada pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah menggunakan warga Cina sebagai pemungut pajak. Protes petani memiliki beragam gerakan, yaitu gerakan revivalisme Suradi alias RM Kapiten pada 1871 di Boyolali, gerakan Ali Suwongso di desa Jatinom pada 1881, gerakan 'mesianisme' Mangkuwidjojo di desa Melbung, Klaten pada 1865, gerakan 'Imam Mahdi' Tirtowidjat (Raden Joko) di desa Bakalan, Kartasura pada 1886, dan gerakan 'Srikaton' dari desa Tawangmangu, Girilayu dan Matesih Karanganyar pada 1888.

Gerakan anti-pemerintah digerakkan oleh Haji Misbach pada 1923, yang dikenal sebagai Huru-hara Haji Misbach. Gerakan ini memiliki unsur pemberontakan sebagaimana pada 1880-an, tetapi lebih kuat aspek ideologisnya. Haji Misbach menggabungkan tiga ajaran: Muhammad, Marx dan sinkretis Jawa, dengan konsep "Sosialisme Semangka", "menyatukan semangat egaliter Islam dipadukan dengan ideologi sosialis, sehingga melahirkan kekuatan pribumi arus bawah".²⁴ Sasaran gerakan Haji Misbach tidak hanya pemerintah dalam makna struktural, tetapi kekuatan simbol kapitalis, yaitu Gubememen, Raja Bumi Putera (aristokrasi), pengusaha Cina, dan pengusaha kaya Muslim. Bersama Matoekalimoen, Haji Misbach membentuk organisasi Sarekat Rakyat (SR), dan melakukan serangkaian perlawanan, yaitu pemogokan buruh kereta api di stasiun Balapan pada Mei 1923, pembakaran gedung sekaten, penculikan, pembakaran gedung kraton, pemboman terhadap mobil keluarga dan pegawai kraton. Akibat serangkaian kekerasan ini Haji Misbach dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda ke Manukwari, Irian Jaya.

Gerakan anti-pemerintah selanjutnya adalah Gerakan Anti Swapraja pada 1946, setahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yang melibatkan berbagai unsur sosial. Gerakan ini menandai puncaknya

kemerosotan wibaya kerajaan dan kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah Raja Pakubuwana XII. Kedekatan keluarga raja dengan pemerintah kolonial Belanda dan pemihakan mereka melawan kepentingan umum rakyat Surakarta selama lebih dari tiga abad. Gerakan anti Swapraja ini berlangsung selama tiga tahun, 1945-1948, menentang kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran untuk kembali memerintah daerah swapraja. Gerakan ini dipelopori oleh berbagai partai politik, laskar perjuangan, serikat buruh, kelompok intelektual, aparat pangreh praja kabupaten Sragen (kasunanan), aparat pangreh praja Wonogori (Mangkunegaran) dan beberapa tokoh kerajaan. Kerusuhan dimulai pada Oktober 1945, dengan penganiayaan adik Mangkunegaran ke VIII oleh anggota Panitia Anti Swapraja (PAS). Selanjutnya, upaya penculikan terhadap adik putri raja Pakubuwana ke XII. Dan, aksi corat-coret ditembok *Supit Urang* Baluwarti, dengan kata-kata sebagai berikut: 'Guritno dan ibunya harus pergi', 'geledah dan teliti'.²⁵ Kalimat ini menunjukkan lemahnya posisi kultural kerajaan.

Terakhir, kerusuhan anti-pemerintah, yaitu pada November 1999, dikenal sebagai November Kelabu, ketika MPR pusat sepakat mengangkat Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI, mengalahkan Megawati Sukarnoputri dengan *voting*. Kekecewaan pendukung Megawati karena mereka memandang bahwa dengan kemenangan mutlak suara calon presiden Megawati pada Pemilu 1999, otomatis menjadi Presiden terpilih. Massa pendukung Mega membakar gedung-gedung aset negara dan swasta, Balaikota, kantor Polisi, dan sebagainya. Menurut Soedarmono dan Muhammad Amin, terdapat kesengajaan yang dirancang oleh sekelompok pendukung Orde Baru untuk memfasilitasi tayangan televisi layar lebar gratis di halaman Balaikota menjelang pemungutan suara pemilihan presiden. Dengan demikian massa terkonsentrasi di Balaikota. Setelah Megawati dinyatakan kalah dalam pemungutan suara, terjadilah pembakaran dan pengrusakan gedung-gedung pemerintah. Pada saat pembakaran ini musnah juga beberapa dokumen penting kebijakan Orde Baru yang membahayakan Sala.²⁶

Potensi kekerasan di Kota Sala berlanjut hingga kini, dengan tumbuhnya berbagai organisasi berbasis agama. Kelompok berdasarkan agama ini kerap melakukan aksi yang berpotensi menyulut kekerasan, misalnya dengan *sweeping*, tablig akbar, dan sebagian lainnya dengan pemboman. Ketika terjadi konflik di Maluku dan Poso, masyarakat yang merespon secara masif adalah Muslim Sala, dengan membentuk posko solidaritas Muslim. Sejak 1999 terbentuklah beberapa organisasi yang memiliki prinsip melaksanakan syari'at Islam secara totalitas (*kaffah*). Beberapa organisasi yang didirikan dan berkembang di Kota Sala adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Sala, Laskar Umat Islam Surakarta

(LUIS), Forum Komunikasi Aktifis Masjid (FKAM), Laskar Jundullah, Majelis Tafsir Alqur'an (MTA), Laskar Mujahidin Kompak, Forum Perlawanan Penculikan (FPP), Jaringan Muda Untuk Ummat (Jami'at), dan beberapa lainnya. Penerbitan atas buku-buku dan majalah yang menyuarakan *Jihad* juga berpusat dari Sala.

Integrasi Sosial

Pasca runtuhnya Orde Baru, gejala disintegrasi terjadi di Indonesia ditandai dengan egosentrisme 'pribumi' etnisitas. Ketika awal konflik di Maluku, pengusiran masyarakat pendatang menjadi isu utama. Istilah BBM (Buton, Bugis, Makassar) adalah bagian dari sikap anti pendatang, yang dimainkan oleh beberapa elit lokal untuk kepentingannya sendiri. Gejala ini juga terjadi di Poso dan Sampit. Otonomi Daerah dipahami secara tidak utuh, bukan membangun kemajuan daerah secara bersama, tetapi memberi konsesi lebih baik bagi etnis "asli" lokal. Prof. T. Jacob menjelang wafatnya resah atas meningkatnya gejala kebanggaan etnisisme berlebihan yang mengancam perpecahan bangsa Indonesia yang multietnis. Sekelompok masyarakat merasa "yang paling baik, paling beradab, bahasanya paling kaya, budayanya paling luhur, adabnya paling lengkap, masyarakatnya paling teratur, keseniannya paling bermutu, tabiatnya paling damai, paling mandiri."²⁷ T. Jacob mengakui bahwa setiap suku memiliki keunggulan masing-masing, dan sangat baik untuk kemajuan bangsa apabila mereka saling melengkapi.

Masyarakat Kota Sala telah dibentuk sebagai masyarakat plural sejak lebih dari tiga abad yang lalu. Pada sensus tahun 1920-an telah banyak masyarakat yang berasal dari berbagai etnis, antara lain Cina, Arab, Banjar, dan Jawa. Meskipun Jawa sebagai etnis mayoritas, tetapi dalam banyak tempat interaksi sosial yang heterogen ini telah lama berlangsung. Pasar misalnya, menjadi pusat komunikasi dan interaksi antar beragam etnis. Kerusuhan Mei 1998 menjadi pelajaran sangat berharga bagi semua lapisan masyarakat Kota Sala. Mereka kemudian membentuk forum komunikasi, yang secara rutin diikuti oleh para tokoh masing-masing etnis dan agama. Dalam setiap peristiwa penting mereka bertemu, mendiskusikan masalah, dan bersatu menyelesaikannya secara damai.

Kesimpulan

Agama telah menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka merefleksikan setiap aktivitas dan gerakan dilandasi dengan keyakinan masing-masing. Dalam sejarah agama dianut oleh

masyarakat Indonesia melalui proses evolutif yang panjang sejak masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam dan kolonial Eropa. Selain agama menjadi unsur keragaman Indonesia, etnisitas juga memegang peranan penting. Karena itu, agama dan etnisitas mewarnai setiap gejolak dan pergolakan sosial dan politik. Masa pergolakan awal adalah antara Hindu-Buddha dan Islam, kemudian disusul dengan pertarungan antara Islam dan Kristen sejak abad ke 14, ketika periode ekspansi Eropa ke berbagai belahan dunia dimulai. Akan tetapi, tulisan ini melihat gejala sosial beberapa abad menjelang runtuhnya kolonialisme Eropa di Indonesia dari konteks lokal, khususnya wilayah Surakarta atau Sala. Gejala yang melahirkan tradisi radikalisme, sikap pemberontakan yang ditujukan pada penguasa (secara politik) atau kelompok berkuasa (secara ekonomi) untuk suatu cita-cita atau harapan terciptanya keadilan. Berdasarkan ideologi gerakan, radikalisme sosial 'Wong Sala' setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, kelompok kiri yang digerakkan oleh masyarakat buruh atau kelompok yang menginginkan adanya keadilan ekonomi. *Kedua*, kelompok kanan yang dilandasi dengan semangat agama (Islam) melawan hegemoni negara. Kelompok kedua ini muncul akibat kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok Islam.

Radikalisme sosial muncul akibat ketimpangan sosial. Dambaan masyarakat lapis bawah atas munculnya 'ratu adil' menciptakan kelompok sosial yang kritis dan cenderung melawan kekuasaan. Mereka pada awalnya membentuk kekuatan melawan hegemoni kelompok feodal yang berkolaborasi dengan pemerintah kolonial, tidak didasari dengan elemen nasionalisme tetapi ketidakpuasan atas berbagai kebijakan yang menyudutkan posisi masyarakat. Misalnya, pemaksaan alih hak penggarapan atas lahan pertanian, menjadi kontrak ekonomi. Perubahan hirarki ini menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan hingga lebih dari dua abad, sejak abad 18 hingga awal abad 20. Kuatnya kelompok buruh ini sangat mewarnai relasi politik pada masa Orde Lama, bagaimana hampir seluruh sendi politik dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasionalis Indonesia, dan para akhir Orde Baru Partai Demokrasi Indonesia pro Mega mulai menunjukkan kekuatan. Pasca runtuhnya Orde Baru, masyarakat Sala mayoritas memilih PDIP sebagai aspirasi politik. Kelompok nasionalis-abangan sangat kuat dalam sejarah radikalisme sosial Sala. Sebagai 'penguasa' mereka berhadapan dengan kelompok radikal kanan, yang membentuk milisi-milisi. Beberapa kelompok laskar Islam secara radikal membentuk gerakan yang mencerminkan ideologi mereka. Beberapa aktivitas, antara lain *sweeping* terhadap warga Amerika, demonstrasi anti pemerintah, dan aktivitas lainnya menunjukkan kekuatan mereka.

Karena itu, pluralitas masyarakat Sala menjadi tantangan serius bagi kalangan intelektual, tokoh masyarakat dan pemerintah bagaimana radikalisasi mereka bisa terarah untuk membangun. Persoalan mendasar masih menghantui kehidupan masyarakat Sala, antara lain kemiskinan yang luas, perbaikan kehidupan ekonomi yang lamban, dan represi keamanan atas kelompok-kelompok yang dianggap membahayakan negara.

Peran Kelompok Mediasi

Kerusuhan Mei 1998 memunculkan banyak kelompok mediasi, yang berupaya memulihkan hubungan sosial masyarakat Sala. Para intelektual dari berbagai lapisan masyarakat mulai menyadari untuk melakukan komunikasi secara baik bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara bersama. Dengan adanya komunikasi ini, segala kemungkinan gejolak sosial bisa diatasi lebih dini. Tiadanya kelompok mediator menjelang kerusuhan Mei 1998 menyebabkan luapan emosi masyarakat yang susah dibendung. Lebih-lebih terdapat kelompok ketiga yang menginginkan adanya kekacauan di tengah tuntutan politik nasional diturunkannya Suharto dari kekuasaan. Beberapa mediator telah muncul, terdiri dari unsur politik, budayawan dan agama. Yang menonjol di antaranya adalah upaya Mudrik Sangidu, ketua Partai Persatuan Pembangunan untuk memulihkan hubungan antara pribumi dan Cina. Selanjutnya, pertemuan para tokoh masyarakat yang diikuti oleh para budayawan untuk merefleksikan kondisi masyarakat Sala yang porak-poranda akibat kerusuhan. Kelompok terakhir, mediasi yang diikuti oleh para tokoh agama. Di antaranya adalah beberapa pertemuan strategis di Pesantren Al Muayyat yang dipimpin oleh Ustadz Nafi'. Pertemuan ini juga menghasilkan kesadaran bersama pentingnya pendidikan yang mencerminkan sikap toleran dan menghormati perbedaan agama dan etnis.

Dengan demikian, keragaman perlu dilihat sebagai bagian dari proses alam yang harus dijaga keseimbangannya. Eksistensi penguasa Cina, Muslim dan masyarakat berbeda agama dan keyakinan baik Muslim, Kristen, abangan menunjukkan fenomena masyarakat yang terbentuk selama ratusan tahun. Ini menjadi tantangan bagaimana, misalnya pendidikan Islam mulai memperkenalkan kehidupan yang toleran. Upaya ustadz Nafi' untuk membuka pesantren bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama dan etnis merupakan langkah positif untuk terciptanya pendidikan yang berorientasi perdamaian. Beberapa tokoh non Muslim sangat resah atas pendidikan di beberapa lembaga Islam yang berorientasi ekstrim, dan cenderung melihat agama lain sebagai ancaman. Perasaan tidak aman, resah, dan khawatir ini secara

jangka panjang tentu menghambat terciptanya hubungan sosial yang harmonis. □

Catatan akhir:

¹ Tulisan ini merupakan refleksi atas hasil penelitian kompetitif kerja sama UIN Jakarta dengan Departemen Agama RI Tahun 2007. Peneliti adalah Masykur Wahid, Badrus Sholeh, dan Khairul Fuad.

² Badan Pusat Statistik, *Kota Surakarta Dalam Angka 2005*, Solo: Badan Pusat Statistik, 2006, hal. 27.

³ M. Hari Mulyadi dan Soedarmono *et.al. Runtuhnya Kekuasaan 'Kraton Alit' (Studi Radikalisasi Sosial 'Wong Sala' dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta)*, Sala: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan, 1999, hal. 18-19.

⁴ *Ibid.*, hal. 20.

⁵ *Ibid.*, hal. 21.

⁶ BPS, *Kota Surakarta Dalam Angka 2005*, Sala: Badan Pusat Statistik, 2006, hal. 35.

⁷ Didirikan di Malaysia pada Januari 1992, dengan pimpinan pertama, Ustadz Abdullah Sungkar, kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir pada 1999. Keduanya adalah pendiri Yayasan Islam Al Mukmin Sala pada 1972.

⁸ R Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred Religion, Violence, and Reconciliation*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000, hal. 6-7.

⁹ Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, Sala: Penerbit Al Jazeera, 2005.

¹⁰ Wawancara di Sala, 9 Desember 2007.

¹¹ Ayu Windi Kinasih, *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Sala*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gajah Mada, 2006, hal. 68.

¹² *Ibid.*, hal. 36.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kholid, aktivis Muslim, wawancara di Sala, 8 Desember 2007.

¹⁵ Wawancara di Sukoharjo, Oktober 2007.

¹⁶ M. Dian Nafi' *et.al. Praksis Pembelajaran Pesantren*, Sala: Forum Pesantren, 2007.

¹⁷ Romo Mardi, Wawancara di Sala, 9 Desember 2007.

¹⁸ Soedarmono dan Muhammad Amin, *Laboran Penelitian Dosen Muda Solusi Konflik Pribumi dan Non Pribumi di Kota Solo*, Sala: Fakultas Sastra, Universitas Sebelas Maret, 2002, hal. 15.

¹⁹ Thung Ju Lan *et.al, Etnisitas dan Integrasi di Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, PMB-LIPI, Jakarta: 2000, hal: 207-209

²⁰ *Ibid.*, hal: 183. Dalam buku tersebut, Thung Ju Lan tidak menyebutkan sumber dari analisa tersebut. Menurutnya, tujuan penelitian yang dilakukannya adalah untuk membuktikan analisa tersebut.

²¹ Thung Ju Lan *et.al, Pemecahan Masalah Hubungan Antar Etnis: Etnisitas dan Konflik Sosial*, PMB-LIPI, Jakarta: 1999, hal:208-209

²² James T. Siegel, "Early Thoughts on the Violence of May 13 and 14, 1998 in Jakarta", *Indonesia*, 66 (Oktober 1998), hal. 76.

²³ Tiik Suwariyati, "Kasus Kerusakan Sosial di Solo, Jawa Tengah", dalam Imam Tholikhah *et.al. Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama, 2002, hal. 100-103.

²⁴ *Ibid.*, hal. 16.

²⁵ *Ibid.*, hal. 18.

²⁶ *Ibid.*, hal. 24.

²⁷ Prof. Dr. T. Jacob, 'Yang Teramat Paling Sekali', *Kedaulatan Rakyat*, 18 Oktober 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2006. *Kota Surakarta Dalam Angka 2005*, Badan Pusat Statistik, Solo.
- Hefner, Robert W. 1997. 'Print Islam: Mass Media and Ideological Rivalries among Indonesian Muslims', *Indonesia*, No. 64, (October).
- Jacob, T. 2007. 'Yang Teramat Paling Sekali', *Kedaulatan Rakyat*, 18 Oktober.
- Kinasih, Ayu Windy. 2005. *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Lan, Thung Ju *et.al.* 2000. *Etnisitas dan Integrasi di Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, PMB-LIPI, Jakarta.
- Lombard, Denys and Claudine Salmon. 1993. 'Islam and Chineseness', *Indonesia*, No. 57 (April).
- Mulyadi, M. Hari dan Soedarmono *et.al.* 1999. *Runtuhnya Kekuasaan 'Kraton Alit' (Studi Radikalisasi Sosial 'Wong Sala' dan Kerusakan Mei 1998 di Surakarta)*, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan, Solo.
- Nafi', M. Dian *et.al.* 2007. *Praksis Pembelajaran Pesantren*, Forum Pesantren, Solo.
- Raillon, Francois. 1993. 'The New Order and Islam, or the Imbroglia of Faith and Politics', *Indonesia*, No. 57 (April).
- Ricklefs, M.C. 1993. *War, Culture and Economy in Java 1677-1726 Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period*. Allen & Unwin, Sydney.
- Samudra, Imam. 2005. *Aku Melawan Teroris*. Penerbit Al Jazeera, Solo.
- Siegel, James T. 1999. "Early Thoughts on the Violence of May 13 and 14, 1998 in Jakarta", *Indonesia*, 66 (Oktober).

-
- Soedarmono dan Muhammad Amin. 2002. *Laboran Penelitian Dosen Muda Solusi Konflik Pribumi dan Non Pribumi di Kota Solo*, Fakultas Sastra, Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Suwariyati, Titik. 2002. "Kasus Kerusuhan Sosial di Solo, Jawa Tengah", dalam Imam Tholkhah *et.al. Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama, Jakarta.

Masykur Wahid, adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.